

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Program Bantuan Sosial

Menurut Kementerian Sosial, bantuan sosial merupakan bantuan dengan sifat sementara yang diberikan kepada masyarakat miskin, tujuannya agar meningkatkan kehidupannya secara layak. Program bantuan sosial merupakan salah satu komponen program jaminan sosial yang menjadi bentuk realisasi tanggung jawab dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah tentang kondisi masyarakat miskin yang berada ditingkat bawah.

Program ini menjadi implementasi Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.¹

Program Bantuan sosial diberikan dari anggaran Negara (APBN/APBA), program bantuan ini diberikan kepada individu, kelompok dengan ekonominya lemah, dan kelayakan untuk menerimanya diuji terlebih dahulu sesuai dengan kriteria. Program ini dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang atau melalui transfer sesuai dengan syarat.

Konsep pemberdayaan sosial yaitu pemberdayaan bagi masyarakat miskin tujuannya agar meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka, sehingga dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Wujud program pemberdayaan ini adalah dengan memberikan modal yang bisa dipergunakan masyarakat miskin sehingga mereka dapat keluar dari ketidakberdayaan. Jadi konsep pemberdayaan sosial yang

¹ Maria Prudensiana Leda Muga, Novi Theresia Kiak, Clarce Sarliana Maak, *Dampak Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Sikumana – Kota Kupang)*, Vol. 5, No. 2, June 2021 hal .107

mulai diimplementasikan sekarang ini berbeda dengan Bansos.²

Tujuan dari program bantuan sosial, program yang dianggarkan dengan memberikan uang atau barang kepada keluarga miskin sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dikategorikan dalam keluarga miskin. Bantuan diberikan secara selektif dan penggunaan anggarannya jelas.

Adapun tujuan dari Program Bantuan Sosial tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menanggulangi kemiskinan
- b. Rehabilitas sosial
- c. Penanggulangan bencana.³

2. Kesejahteraan Masyarakat

a. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan keadaan seseorang dengan rasa tenang karena adanya pemenuhan hajat hidup lahir dan batin. Kesejahteraan lahir dapat berupa kesehatan, sandang, papan, dan papan. Kesejahteraan ini berupa sosial dan ekonomi. Kesejahteraan batin berupa intelektual, emosional, serta spiritual. Kesejahteraan menjadi tujuan dari sebuah tujuan.⁴

Definisi dari kesejahteraan dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sejahtera mengarah pada keadaan yang aman, sentosa, dan makmur. Aman diartikan sebagai bebas dari adanya gangguan dan bahaya. Ditandai dengan terbebasnya rasa takut dan khawatir. Sentosa dapat diartikan keadaan tanpa adanya kesulitan dan bencana. Sehingga hidupnya selalu dalam kondisi Aman, damai, dan tanpa kekacauan. Keadaan ini ditandai dengan hidupnya yang berkecukupan serta tidak kekurangan. Sehingga kebutuhan hidupnya akan terpenuhi.

Aristoteles memberikan pendapat adanya kebahagiaan setiap orang/manusia itu berbeda tergantung

² Amru Alba, S.A.P., M.A.P, Rudi Kurniawan, S.Sos., M.A.P, “*Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin*”, (Lhokseumawe: Januari, 2019). Hlm. 36-37

³ Reyvaldo Inrico Ialooan, dkk. “*Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa*”, (Jurnal JAP No. 101 Vol.VII 2021). Hlm.49.

⁴ Garda Maeswara, Biografi Prolitik Susilo Bambang Yudhoyono, (Jakarta: Penerbit Narasi ,2009), h.246

dengan jenis orang yang mencarinya dan corak dari kebahagiaan itu sendiri. Terkadang suatu hal yang dianggap seseorang membuatnya Bahagia tidak dengan orang lain, karena kebahagiaan merupakan pencapaian dari diri seseorang yang membuatnya senang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kebahagiaan merupakan tujuan dari setiap diri.

Dengan tercapainya kebahagiaan maka manusia akan melangkah pada kebaikan secara bersamaan. Aristoteles berpendapat kembali bahwa arti dari kebaikan umum yakni sesuatu hal yang apabila sudah tercapai, maka seseorang tidak menghendaki orang lain lagi. Tapi bahagia menjadi anugerah Allah kepada setiap diri, meskipun tidak dirasakan setiap hari dan belum tentu orang lain merasakannya.⁵

Kebahagiaan menurut Al Ghazali dapat diwujudkan berupa cara cinta dengan Allah. Dengan mengetahui Allah menjadi kunci untuk mencintai karena akan timbul rasa cinta serta indahny berhubungan dengan Allah.⁶

Kesejahteraan berupa diraihnya kemaslahatan. Arti dari kemaslahatan adalah terjaganya tujuan syara' (maqashid Al Syariah). Manusia akan merasa bahagia dan damai batinnya setelah mencapai kesejahteraan yang sebenarnya dari umat manusia dengan cara memenuhi kebutuhan rohani dan materi. Untuk mencapainya diperlukan realisasi sumber kesejahteraan seperti terpeliharanya agama, akal, jiwa, harta, serta keturunan.⁷

b. Kesejahteraan Secara Ekonomi

Kesejahteraan menjadi tujuan ekonomi, dengan mengedepankan material dan mengesampingkan moral dan spiritual. Dalam pendekatannya menggunakan Neo-klasik dan pendekatan ekonomi baru. Pendekatan neoklasik menganggap bahwa setiap manusia memiliki kesetaraan pada nilai guna. Artinya setiap manusia dapat membandingkannya.⁸

Pendekatan modern menjadi perkembangan pendekatan neoklasik yang melihat penentuan kesejahteraan diukur tidak hanya secara materi, tetapi juga non materi.

⁵ Elfrindi, *Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Kencana, 2011), 175.

⁶ Hamka, *Tasawuf Modern*, (Jakarta: PT. Pustaka Panji Mas, 1997), 28

⁷ Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali; Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din*. (Surabaya: Bina Ilmu, 2010).

⁸ Dominick Salvatone. *Teori Mikroekonomi*, (Jakarta : Erlangga, 2009), hal. 56.

Kesejahteraan dalam cakupannya terdapat jasmani (materil) serta rohani (nonmaterial).

Badan Pusat Statistik menjelaskan indikator dalam pengukuran kesejahteraan terdiri dari pendapatan, pengeluaran keluarga, kondisi tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan dari anggota keluarga, kemudahan dalam pelayanan kesehatan, kemudahan dalam pendidikan anak, dan kemudahan dalam transportasi.⁹

1. Pengeluaran

Indikator pengeluaran dikelompokkan menjadi 3, sebagai berikut:

a. Tinggi

Kesejahteraan seseorang tergolong tinggi ketika pengeluaran perbulannya mencapai >Rp.5.000.000.

b. Sedang

Kesejahteraan seseorang tergolong sedang ketika pengeluaran perbulan dari keluarganya sebesar Rp.1.000.000 – Rp.5.000.000.

c. Rendah

Kesejahteraan seseorang tergolong rendah ketika pengeluaran perbulan dari keluarganya sebesar <Rp.1.000.000.

2. Kondisi Tempat Tinggal

Indikator tempat tinggal dilihat dari 5 jenis berupa jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai, dan luas lantai. Kemudian dikelompokkan menjadi 3, yakni:

a. Permanen

Kriteria ini didasarkan pada kualitas lantai, dinding, dan atap. Rumah permanen memiliki lantai ubin/keramik/kayu berkualitas tinggi, dindingnya berupa tembok/kayu berkualitas tinggi, dan atap berupa seng/sirap/esbes/genteng.

b. Semi permanen

Rumah dengan kriteria ini berupa dindingnya terbuat dari tembok/bata tanpa plester/kayu berkualitas rendah, lantai berupa ubin/semen/kayu berkualitas rendah, serta atap berupa seng/sirap/esbes/genteng.

c. Non permanen

⁹ Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat. Pedoman Pendataan Survei Penduduk Antar Sensus 2005. (Jakarta Pusat : Badan Pusat Statistik, 2015).

Rumah kriteria non permanen dapat berupa dinding sederhana (bambu/daun/papan), lantai berupa tanah, serta atap berupa campuran genteng/seng bekas,dll.

3. Fasilitas Tempat Tinggal

Indikator dari fasilitas tempat tinggal memiliki 12 komponen, yakni pekarangan, penerangan, alat elektronik, pendingin, kendaraan pribadi, bahan bakar memasak, fasilitas dan sumber air minum, sumber air bersih, cara memperoleh air bersih, fasilitas MCK, dan jaraknya. Dari 12 komponen tersebut dikelompokkan menjadi 3, yaitu :

a. Lengkap

Dikatakan lengkap saat 12 komponen yang ada di fasilitas tempat tinggalnya sudah dapat terpenuhi.

b. Cukup

Dikatakan cukup saat lebih dari 6 komponen terpenuhi dengan kondisi layak.

d. Kurang

Dikatakan kurang saat hanya 6 komponen terpenuhi dalam kondisi layak.

4. Kesehatan dari Anggota Keluarga

Indikator ini dikelompokkan menjadi :

a. Bagus

Apabila anggota keluarga yang memiliki keadaan sakit <25%.

a. Cukup

Apabila anggota keluarga dengan persentase kesehatan terhadap keadaan sakitnya 25% - 50%.

b. Kurang

Persentase kesehatan terhadap keadaan sakitnya pada anggota keluarga >50%.

1. Kemudahan dalam Pelayanan Kesehatan

Indikator ini memiliki komponen berupa jarak terdekat dari rumah sakit, jarak toko obat, alat kontrasepsi, harga serta penanganan dari obat-obatan. Dari kelimanya dikelompokkan menjadi 3 kriteria :

a. Mudah

Lima kriteria terpenuhi

b. Cukup

Minimal 3 dari 5 kriteria sudah terpenuhi

c. Sulit

Lebih dari 3 kriteria tidak dapat terpenuhi.

2. Kemudahan dalam Pendidikan Anak

Indikator ini memiliki 3 komponen berupa biaya sekolah, jarak tempuh, dan proses penerimaan. Selanjutnya dikelompokkan lagi menjadi 3 kriteria, yaitu :

a. Mudah

Ketiga komponen diatas terpenuhi

b. Cukup

2 dari 3 komponen bisa terpenuhi

c. Sulit

Hanya 1 dari 3 komponen yang bisa terpenuhi.

3. Kemudahan dalam transportasi

Indikator ini terbagi dalam 3 komponen berupa status kepemilikan kendaraan, biaya serta fasilitas kendaraan. Selanjutnya dikelompokkan menjadi 3 kriteria, berupa:

a. Mudah

3 komponen terpenuhi

b. Cukup

2 dari 3 komponen terpenuhi

c. Sulit

Hanya 1 komponen yang terpenuhi

c. Fungsi Kesejahteraan

Fungsi kesejahteraan sosial, sebagai berikut:

1. Fungsi pencegahan. Fungsinya dalam kesejahteraan adalah memperkuat individu, keluarga, serta masyarakat supaya terbebas dari masalah sosial baru.
2. Fungsi penyembuhan. Kesejahteraan berguna dalam ketidakberdayaan fisik, sosial, serta emosional sehingga seseorang dapat pulih di masyarakat.
3. Fungsi pengembangan. Fungsi ini berkaitan dengan sumbangsih secara langsung maupun tidak pada pengembangan tatanan dan sumber daya sosial di masyarakat.
4. Fungsi penunjang. Cakupannya pada kegiatan dalam pencapaian tujuan pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya.

2. Kesejahteraan Masyarakat dalam Ekonomi Syariah.

a. Pengertian Kesejahteraan (Falah) dalam Ekonomi Syariah

Al Falah memiliki arti zhafarah bima yurid (kemenangan atas keinginan), Al Falah sendiri berarti

menang, keberuntungan atas kenikmatan di akhirat. Falah berarti kemuliaan dan kemenangan di hidup.¹⁰

Kesejahteraan menurut ekonomi syariah adalah terhindarnya rasa was-was pada kekerasan, masa depan, rasa sakit, kelaparan, dahaga, serta lingkungan. Dalam hal ini, telah digambarkan dalam Al Quran Surah Taha ayat 117-119:¹¹

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ۝
 إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ۝ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ۝

Artinya : Maka Kami berkata: "Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya". (Qs : Taha 117-119).

Ayat di atas memberikan gambaran bahwa kebutuhan sandang, pangan, dan papan sudah terpenuhi. Dengan begitu menjadi bagian awal dari kesejahteraan masyarakat.

b. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat dalam Ekonomi Syariah

Kesejahteraan individu maupun sosial bermasyarakat telah diakui dalam Islam supaya saling melengkapi dan tidak saling berseteru.¹²

Terdapat kategori kesejahteraan menurut ekonomi yang sumbernya berasal dari ajaran Islam, sebagai berikut:¹³

1. Keadilan. Dijunjungnya nilai kejujuran, keberanian, konsisten, serta kebenaran untuk semua hal yang benar.

¹⁰ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), . h.2

¹¹ M.Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran : Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat, Bandung, Mizan, 2000, h.127

¹² M. Umer Chapra, Islam Pembangunan Ekonomi, Jakarta, Gema Insani Press, h.8

¹³ Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid I, terjemah, soeroyo,(Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2000), h.52

2. Pertanggungjawaban. Menerapkan perilaku ekonomi yang baik serta mewujudkan kemaslahatan, menjadi tanggung jawab bagi pelaku ekonomi. Selain itu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga menjadi tanggung jawabnya.
3. Tafakul jaminan sosial. Dengan dilaksanakannya jaminan sosial bertujuan terjalannya seseorang dan masyarakat. Dalam hal ini Islam mengharuskan adanya kedua hubungan agar seimbang.

Menurut Asy-Syatibi peningkatan kesejahteraan masyarakat memiliki hubungan dengan ekonomi syariah yaitu pada tujuan syariah. Yang dimaksud ialah pada bagian keimanan (Ad-din), akal (Al-aql), kekayaan (Al-mal), jiwa (An-nafs), dan keturunan (An-nasl).¹⁴

c. Indikator Kesejahteraan Menurut Islam

Dijelaskan dalam Surah Al-Quraisy Ayat 3-4

اللَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝ ٣

Artinya: Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. (Qs: Al-Quraisy 3-4).

Islam sudah menjelaskan bahwa hubungan antar manusia dan keadilan menjadi titipan Allah agar dapat mengimplementasikan maqashid syariah, indikator tersebut berupa:¹⁵

1. Tercukupi kebutuhan pokok
2. Meratanya penyaluran pendapatan dan kekayaan
3. Sumberdaya pendapatan yang baik

3. Program Bantuan Sosial

a. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian PKH

Program keluarga harapan (PKH) merupakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2007. Program ini dikenal dengan bantuan tunai bersyarat

¹⁴ Adiwarmanto A. Karim, ekonomi Mikro Islam, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012, h.62

¹⁵ Adiwarmanto A. Karim, ekonomi..., h11.

atau *conditional cash transfer* (CCT). Tujuan dari program PKH adalah pencapaian pengentasan kemiskinan berjangka panjang.¹⁶

Program keluarga harapan didefinisikan oleh Jones dalam Arif Rahman adalah rancangan dari asas serta usaha pada bidang ketatanegaraan dan perekonomian.¹⁷

Program keluarga harapan (PKH) menjadi program perlindungan sosial dengan bantuan tunai diberikan kepada rumah tangga miskin (RTM) dan anggota keluarganya dengan syarat dan ketentuan tertentu sesuai ketetapan. Dalam jangka pendek PKH memiliki tujuan dalam pengurangan beban RTM serta dalam jangka panjangnya akan mengentaskan kemiskinan antar generasi, maka generasi selanjutnya akan terbebas dari lingkaran kemiskinan.¹⁸

2. Tujuan PKH

Menurut Kementerian sosial yaitu peningkatan aksesibilitas pada pelayanan pendidikan, kesehatan, serta Kesejahteraan Sosial guna mendukung terciptanya kualitas hidup dari keluarga miskin.¹⁹

Tujuan dari adanya program PKH sebagai berikut :²⁰

- a. Peningkatan taraf hidup keluarga penerima manfaat dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosialnya.
- b. Pengurangan beban pengeluaran serta peningkatan pendapatan dari keluarga miskin.
- c. Terciptanya perubahan tingkah laku dan kemandirian dalam hal kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
- d. Membantu mengurangi kemiskinan serta kesenjangan.
- e. Pengenalan produk dan jasa keuangan formal.

¹⁶ Adi sanjaya, dkk., "Program Keluarga Harapan (PKH) antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan," *Ejournal Riset & PKM 4, no. 1* (2016): 27.

¹⁷ Dyah Ayu Vorgoreta, Ratih Nur Pratiwi, "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat"

¹⁸ Rosmiati, dkk, *Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II*, (NA: KOMINFO RI, 2015), 18.

¹⁹ www.kemensos.go.id diakses pada tanggal 10 November 2023 pukul 21.17 WIB.

²⁰ Nyi R. Irmayani, Badrun Susantyo dkk, *Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan Pasca Diklat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga*, Cetakan 1, (Jakarta : PUSLITBANGKESOS KEMENTRIAN SOSIAL RI, 2019), 20.

3. Landasan Hukum PKH

Program keluarga Harapan memiliki landasan hukum, sebagai berikut:

- a. Undang-undang No.40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional.
- b. Perpres No.15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.
- c. Keputusan Menkes RI No.29 tahun 2003 tentang pendidikan dan pelayanan SDM.
- d. Keputusan Menkes RI No.02A/HUK/2008 tentang tim pelaksana program keluarga harapan tahun 2008 tanggal 08 Januari 2008.²¹

4. Kriteria Penerima PKH

Penerima dari PKH memiliki kriteria yang didasarkan pada komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Penjabarannya sebagai berikut.²²

1. Kesehatan, Penerima PKH diharuskan:
 - a) Ibu hamil/nifas/menyusui. Pada kriteria ini seseorang dengan keadaan mengandung dengan kehamilan yang jumlahnya dibatasi serta dalam masa menyusui.
 - b) Anak usia dini. Anak-anak yang berkisar antara usia 0 sampai 6 tahun dan belum bersekolah.
2. Pendidikan

Pada kriteria ini penerima PKH merupakan anak dengan usia sekolah dari umur 6 sampai 21 tahun, dengan menempuh pendidikan dari SD maupun sampai SMA.
3. Kesejahteraan Sosial

Pada kriteria ini, penerima diharuskan:

 - a) Lanjut Usia. Seseorang dengan usia lanjut dan harus tercatat dalam KK keluarga yang sama serta berada dalam keluarga tersebut.
 - b) Penyandang disabilitas berat. Seseorang yang tidak dapat berkegiatan atau dalam hidupnya bergantung pada orang lain serta tidak berkemampuan menghidupi dirinya serta

²¹ Peraturan Menteri Sosial RI, “1 Tahun 2018, Program Keluarga Harapan.

²² Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, (Jakarta: kementerian RI tahun , 2021) 22-23

tercatat dalam KK yang sama keberadaannya dalam keluarga tersebut.

b. Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra)

1. Pengertian Rastra

Beras Sejahtera merupakan cara pemenuhan kebutuhan dasar dengan bentuk pangan dilaksanakan dalam skala nasional. Program ini berawal dari pola subsidi diubah menjadi bantuan sosial. Bansos Rastra diberikan kepada KPM berupa beras dengan kualitas dan kuantitas sesuai peraturan yang berlaku.²³

Kualitas berasnya medium dengan kuantitas serta 10 kg. Perum Bulog merupakan pendistribusi dari beras Sejahtera yang akan diberikan kepada KPM melalui kantor/balai desa/kelurahan, maupun lokasi lain sesuai dengan kesepakatan Pemerintah Kabupaten dari miring kota ngan) dengan Perum Bulog.

2. Tujuan dan Manfaat Bansos Rastra

Tujuan Bansos Rastra dituangkan dalam pasal 6 permenkeu No.254 tahun 2015, sebagai berikut:

- a. Perlindungan sosial, tujuannya dalam hal pencegahan dan penanganan berisiko dari kerentanan sosial supaya kelangsungan hidupnya dapat terpenuhi sesuai kebutuhan dasar minimalnya.
- b. Rehabilitasi sosial, tujuannya dalam hal pemulihan serta pengembangan dari skill seseorang yang terjadi diskusi sosial supaya dapat melaksanakan secara wajar fungsi sosialnya.
- c. Jaminan sosial, adalah skema yang melembaga supaya terjaminnya kebutuhan dasar hidup layak dari seluruh masyarakat.
- d. Pemberdayaan sosial, adalah upaya pengarahan yang menjadikan masyarakat yang berdampak masalah sosialnya supaya memiliki daya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
- e. Penanggulangan Kemiskinan, merupakan program, kegiatan, dan kebijakan yang dikerjakan orang, keluarga, kelompok, masyarakat bersumber mata

²³ Bab II huruf E Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera
2018

pencapaian dan pemenuhan kebutuhan yang layak tidak terpenuhi.

- f. Penanggulangan bencana, menjadi rangkaian cara berupa ditetapkan kebijakan pembangunan risiko dari timbulnya bencana, tanggap darurat, antisipasi bencana, dan rehabilitasi.

Tujuan bansos rastra secara khusus adalah pengurangan beban pengeluaran KPN dengan cara memberikan bansos berupa beras kualitas medium dengan jumlah 10 kg tanpa adanya biaya yang asalnya dari pemerintah.²⁴

Manfaat Bansos Rastra

Manfaat bansos Rastra tidak hanya dirasakan oleh KPM, tetapi menjadi pengelolaan pangan menyeluruh oleh negara. Manfaat bansos rastra, sebagai berikut.²⁵

- a. Meningkatkan ketahanan pangan dari KPM, dengan menjadi mekanisme perlindungan sosial serta penanggulangan kemiskinan.
- b. Meningkatnya akses pangan secara fisik bahkan ekonomi kepada KPM.
- c. Menjadi pasar bagi hasil usaha tani padi.
- d. Stabilisasi harga beras di pasar.
- e. Mengendalikan inflasi dengan terjaganya stok pangan nasional dan intervensi pemerintah.
- f. Mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

3. Penerima Bansos Rastra

Penerima Bansos Rasta merupakan keluarga dengan presentasi 25% terendah di daerah pelaksana dalam hal kondisi sosial ekonomi. Penerima bansos ini datanya sudah terdaftar di Kementerian Sosial yaitu data terpadu penanganan fakir miskin. Data ini dikelola oleh kelompok kerja pengelola data terpadu program penanganan fakir miskin.

Daftar KPM disampaikan Kementerian Sosial kepada pemerintah provinsi kemudian ke kabupaten/kota. Setiap KPM memiliki informasi yang tercatat pada data tersebut berupa:²⁶

2018 ²⁴ Bab I huruf B Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera

²⁵ Bab II Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun 2018

²⁶ Ibid, Bab IV huruf C angka 1 dan 2

- a. Nama pasangan kepala keluarga/pengurus/istri.
- b. Nama kepala keluarga.
- c. Nama anggota keluarga lainnya.
- d. Alamat tinggal keluarga.
- e. Kode unik.

4. Pengawasan Bansos Rastra

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 254/PMK. 05/2015 mengenai belanja bantuan sosial pada Kementerian negara/lembaga, dinyatakan bahwa bansos diawasi oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) Kementerian negara /lembaga.²⁷

Dalam hal pengawasan distribusi Rastra dilakukan oleh badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) serta aparat pengawas internal pemerintah dan daerah sesuai Perpu.²⁸

Terdapat juga Badan Pemeriksa Keuangan BPK sebagai pengawas dalam pengelolaan rastra sesuai UU Republik Indonesia No.15 Tahun 2006 yang isinya menyatakan bahwa memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menjadi salah satu tugas dari BPK.

c. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

1. Pengertian BPNT

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan sosial pangan bentuknya non tunai yang dijalankan pemerintah untuk kelompok penerima manfaat dengan cara elektronik, disetorkan setiap bulan di pedagang pangan/-E-warong.²⁹

Program ini adalah ikhtiar dari pemerintah dalam pengurangan beban pengeluaran dari masyarakat miskin. Dengan adanya program BPNT diharapkan terjadi perubahan pada pola pengeluaran masyarakat miskin yakni meningkatnya konsumsi pangan/non pangan.³⁰

²⁷ Pasal 38 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK. 05 /2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga

²⁸ Bab V huruf A Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun 2018

²⁹ Benny Rachman, dkk. *"Efektifitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)"* Analisis Kebijakan Pertanian, Vol 16. No. 1, Juni 2018, h. 2.

³⁰ Silvia Maulidina, "Analisis Korelasi Program Bantuan Pangan Non Tunai terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga miskin" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan Bandung, 2018), h.26.

Pada proses penyaluran BPNT, KPM mendapat kartu keluarga sejahtera (KKS). Serta KPM merupakan masyarakat dengan kondisi ekonominya 25% terendah di daerah terlaksana program.³¹

2. Tujuan dan Manfaat BPNT

Tujuan bantuan pangan non tunai:

- a. Membantu pengurangan beban pengeluaran KPM dengan pemenuhan pangan.
- b. Nutrisi KPM terpenuhi
- c. Peningkatan ketetapan sarana dan waktu bagi KPM
- d. Pemenuhan kebutuhan pangan bagi KPM lebih bervariasi serta tercukupi
- e. Pembangunan berkelanjutan didorong agar tercapai tujuannya.

Manfaat bantuan pangan non tunai:

- a. Keluarga penerima manfaat pada ketahanan pangannya akan meningkat, BPNT juga menjadi perlindungan sosial beserta penanggulangan kemiskinan.
- b. Pendistribusian bantuan sosial menjadi lebih efisien.
- c. Pertumbuhan ekonomi di daerah akan meningkat khususnya UMKM di bidang perdagangan.
- d. Transaksi berupa non tunai mengalami peningkatan
- e. Peningkatan layanan keuangan yang dijangkau oleh masyarakat, sehingga kemampuan ekonomi akan sejalan.³²

3. Prinsip Umum BPNT

Prinsip umum pada BPNT mengacu pada buku pedoman pelaksanaan yang disusun oleh kementerian/lembaga lintas sektor. Prinsip tersebut berupa:

- a. Jangkauannya mudah dan diperuntukkan kepada KPM.
- b. Terdapat banyak pilihan dan kendali bagi KPM mengenai bahan pangan dan waktu pengambilan, dapat disesuaikan dengan referensi penerima.

³¹ Rohana dan Mardiyanto, “Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang” *Demography Journal Of Sriwijaya*, Vol.6. 2, Januari 2019, h. 2.

³² Tondi Ramadhan, “Efektivitas Program BPNT Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tampan Pekanbaru”, *Jom fisip*, vol. 5, Edisi II Juli-Desember 2018, h. 10.

- c. Mendorong usaha kecil untuk membantu pelayanan program.
 - d. Memberikan akses jasa keuangan untuk KPM.³³
- 4. Kriteria dan Persyaratan Penerima BPNT**
 Penerima bantuan pangan non tunai diharuskan :
1. Bantuan pangan non tunai disalurkan pada lokasi dengan kriteria bantuan pangan non tunai:
 - a) Adanya jaringan internet
 - b) Adanya E-Warong
 - c) E-warong dijadikan sebagai penyalur bantuan sesuai Perpu.
 2. Peserta BPNT, diharuskan :
 - a) Tercatat pada data terpadu program penanganan fakir miskin.
 - b) Peserta masuk golongan miskin, tidak mampu, dan/atau terhadap risiko sosial, khususnya pernah terdaftar pada PKH.
 3. Kriteria miskin menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai berikut :
 - a) Lantai bangunan seluas kurang dari 8 meter persegi.
 - b) Jenis lantai yang digunakan terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
 - c) Dinding bangunan berjenis bambu/rumbai/kayu dengan kualitas rendah/tembok tanpa plester.
 - d) Tidak memiliki tempat buang air besar/ menumpang pada orang lain.
 - e) Tidak memiliki listrik.
 - f) Air minum bersumber dari sumur/air yang tidak terlindung/ air hujan.
 - g) Menggunakan kayu bakar/minyak tanah sebagai bahan bakar dalam memasak.
 - h) Makan hanya satu/dua kali sehari.
 - i) Konsumsi susu/daging/ayam hanya seminggu sekali.
 - j) Dalam setahun hanya dapat membeli satu setelan baju.

³³Anisa Rahma Dini, “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Kota Bandar Lampung” (Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Lampung , Bandar Lampung, 2019), h. 48.

- k) Tidak berkemampuan membiayai pengobatan di klinik.
- l) Penghasilan bersumber pada pertanian dengan lahan 500m², buruh tani, buruh bangunan, buruh kebun, nelayan, ataupun pekerjaan lain yang berpenghasilan di bawah Rp.600.000 setiap bulan.
- m) Pendidikan tertinggi kepala keluarga yaitu tidak bersekolah/tidak tamat sd/tamat SD.
- n) Tidak memiliki simpanan tabungan/barang yang diperjualbelikan dengan mudah minimal Rp.500.000.³⁴

4. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Pengertian efektivitas menurut Hani Handoko merupakan kemampuan yang ada pada diri digunakan mencapai tujuan serta menggunakannya sesuai dengan teknik dan peralatan.³⁵ Menurut ahli Tunggal, efektivitas merupakan sasaran yang didapat sesuai dengan perhitungan terbaik dari suasana dan prediksi laba.

Efektivitas adalah kemampuan memilih yang tepat untuk tercapainya tujuan. Tercapainya sasaran serta prediksi laba menjadi definisi efektivitas secara umum.³⁶

b. Indikator Efektivitas

Indikator yang dijadikan pedoman dalam pengukuran efektivitas adalah:³⁷

1. Tepat sasaran program merupakan program dijalankan sesuai target sasaran untuk mencapai hasil maksimal.
2. Sosialisasi program merupakan langkah dalam memperkenalkan dan menyebarkan informasi tentang program yang dijalankan.

³⁴ Nur Halimah, "Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" (Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2019), h. 27.

³⁵ T. Hani Handoko, Manajemen, Edisi Ke-2 (Yogyakarta : BPPE, 1998), 7.

³⁶ Widjaja Amin Tunggal, Audit Manajemen Kontemporer, edisi revisi (Jakarta: Erlangga, 2002),85.

³⁷ Budiani, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007),

3. Tujuan Program yaitu target yang dicapai serta hasil pada pelaksanaan program.
4. Pengawasan dari program yaitu proses yang dilakukan gunanya untuk pengevaluasian program.

c. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas kaitannya dengan hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Efektivitas adalah hubungan antara output dalam pencapaian tujuan maka peluang efektif program, organisasi, atau kegiatan semakin besar. Dengan demikian efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Program Bantuan}}{\text{Target Penerimaan program Bantuan}} \times 100\%$$

Setelah mengukur efektivitas, maka tingkat efektivitas diberikan penilaian dengan menggunakan presentase serta kriteria sebagai berikut :

Tabel 2.1

Standar Ukuran Efektivitas Acuan Litbang Depdagri

Rasio Efektivitas	Capaian
Dibawah 40	Sangat tidak efektif
40 - 59,99	Tidak efektif
60 - 79,99	Cukup efektif
Diatas 80	Sangat efektif

5. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu adalah kajian yang dijadikan acuan peneliti pada penelitian terdahulu, sehingga dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Kegunaan dari penelitian terdahulu yaitu membandingkan dari segi persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan terhadap penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema program bantuan sosial, terdapat persamaan objek dari penelitian sebelumnya dengan perbedaan waktu, lokasi, dan pembahasan.

Terdapat penelitian yang dijadikan rujukan dalam penelitian :

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Efektivitas Program Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Kudus. Oleh Farros Althof Swandriano dan Muhammad Arif	Dana Desa dan PIP pengaruhnya signifikan sedangkan PKH tidak signifikan terhadap kemiskinan di beberapa kecamatan kabupaten Kudus antara tahun 2018 dan 2021	Menggunakan program pemerintah (PKH) sebagai objek penelitian	Program bantuan sosial (BPNT, Rastra), waktu penelitian, serta lokasi yang diteliti. ³⁸
2	Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Merak Batin	Implementasi program BPNT di Desa Merak Batin ini belum dapat memenuhi indikator 6T ketepatan BPNT dan implementasi program BPNT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Merak Batin	Objek penelitian berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Tingkat kesejahteraan, serta tinjauan dalam perspektif Islam.	Menggunakan tambahan objek berupa Rastra, dan PKH. Waktu penelitian, lokasi yang berbeda ³⁹ .

³⁸ Farros Althof Swandriano dan Muhammad Arif, *“Efektivitas Program Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Kudus”*, (Surakarta: UMS, 2023).

³⁹ Nisa, A. S. Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

	Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)	menurut Ekonomi Islam hanya dapat memenuhi tanggung jawab dan <i>tafakul</i> (Jaminan Sosial) saja..		
3	Analisis Program Raskin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kecamatan Semidang Gumay) Oleh Partiko Tri Budiawan.	Masyarakat penerima program raskin di Kecamatan Semidang Gumay telah dikatakan sejahtera dan Tinjauan Ekonomi Islam dalam indikator kesejahteraan yakni Pemenuhan kebutuhan pokok, Sumber daya pendapatan yang terhormat, penyaluran merata pada pendapatan dan kekayaan.	Objek yang diteliti Raskin, Kesejahteraan Masyarakat, serta Ekonomi Islam.	Waktu dan lokasi yang diteliti, serta terdapat objek PKH dan BPNT. ⁴⁰
4	Analisis Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Meningkatkan	Implementasi penyaluran (BPNT) di Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone terdapat permasalahan	Objek penelitian berupa BPNT, dalam meningkatkan kesejahteraan, dan terdapat juga KPM.	Menggunakan tambahan objek berupa PKH dan Rastra, waktu penelitian, lokasi, serta dalam

⁴⁰ Partiko Dwi Budiawan, “Analisis Program Raskin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kecamatan Semidang Gumay)”, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020).

	Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Masyarakat Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone) Oleh Adriana.	pada prosedur penyaluran (BPNT) belum terpenuhi secara keseluruhan dikarenakan terbatasnya persyaratan administrasi dan kesejahteraan masyarakat meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan pokok		perspektif ekonomi syariah ⁴¹
5	Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengurangan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau) Oleh Ridho Diana.	Efektivitas dari PKH dalam pengentasan kemiskinan di Kota Jawa masuk dalam kategori tidak baik, dan PKH dalam perspektif ekonomi islam implementasinya masih sebatas bentuk jaminan sosial dari pemerintah untuk masyarakatnya agar terdorong terciptanya hubungan baik	Objek penelitian berupa PKH	Menggunakan tambahan objek berupa Rastra, BPNT, serta waktu penelitian, dan lokasi yang berbeda. ⁴²

⁴¹ Adriana, “Analisis Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Masyarakat Desa Jaling Kec.Awangpone Kab.Bone)”, (Bone: IAIN Bone, 2020).

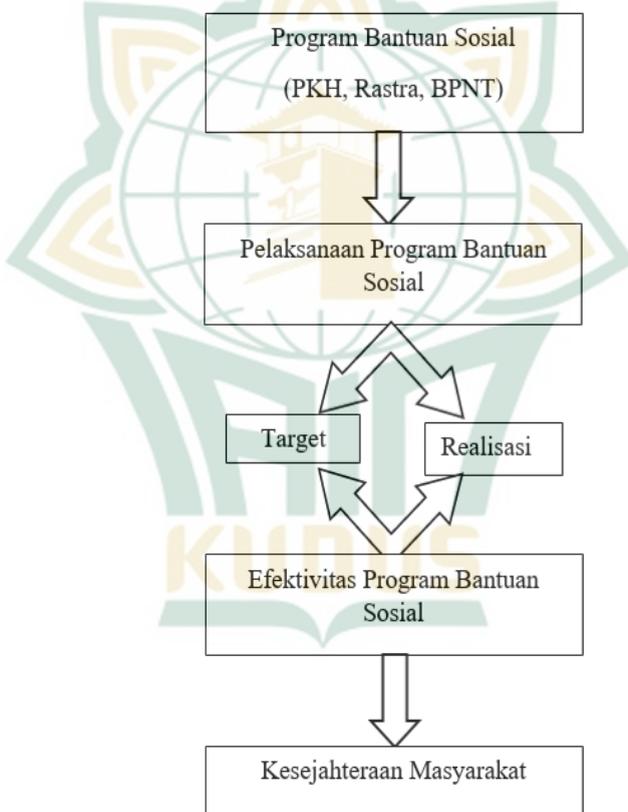
⁴² Ridho Diana, “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengurangan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau)”, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

		diantara keduanya		
--	--	----------------------	--	--

6. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan diagram yang menggambarkan garis besar dari alur logika dari penelitian. Kerangka berpikir berasal dari pertanyaan penelitian, dan menjabarkan himpunan dari banyak konsep serta hubungan antar tersebut.

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir



Dari skema merepresentasikan di Desa Temon Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan mengidentifikasi program bantuan sosial untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.